

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI PADA KARYAWAN DI PT SELARAS CIPTA  
BERSATU)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MICHAEL YEHEZKIEL**

**20200100001**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2024**

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI PADA KARYAWAN DI PT SELARAS CIPTA  
BERSATU)**

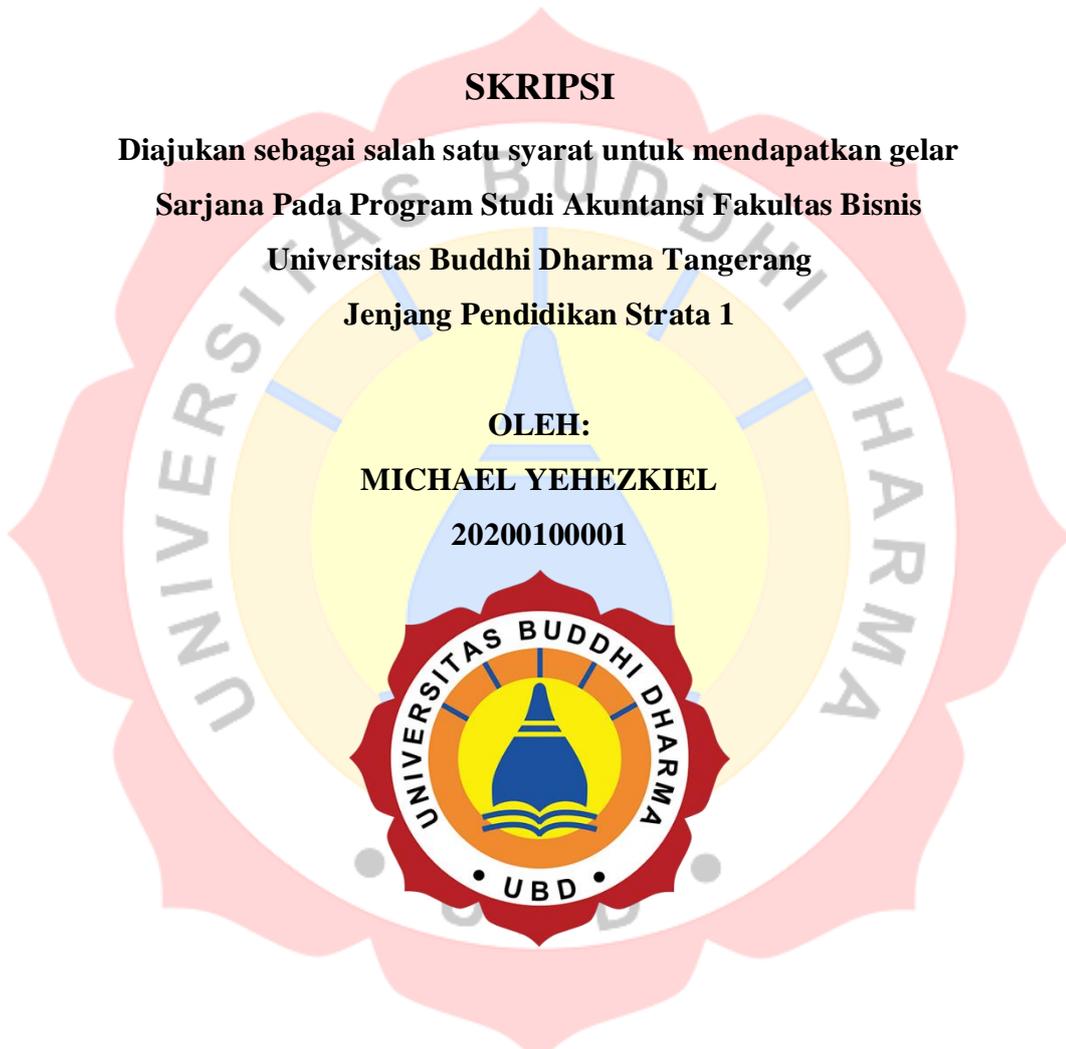
**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH:**

**MICHAEL YEHEZKIEL**

**20200100001**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Michael Ychezkiel  
NIM : 20200100001  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan,  
dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi (studi pada karyawan PT Selaras Cipta Bersatu).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 25 September 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Benyamin Melatnebar, S.E., M.Ak**  
NIDN : 0414068104



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan,  
dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi (studi pada karyawan PT Selaras Cipta Bersatu).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Michael Yechezkiel  
NIM : 20200100001  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi  
Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 08 Januari 2024

Menyetujui,

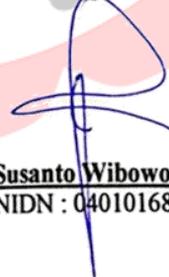
Pembimbing,



Benyamin Melatnebar, S.E., M.Ak  
NIDN : 0414068104

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benyamin Melatnebar, S.E., M.Ak

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Michael Yehezkiel

NIM : 20200100001

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi pada karyawan PT Selaras Cipta Bersatu).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 08 Januari 2024

Menyetujui,

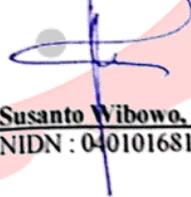
Pembimbing.



Benyamin Melatnebar, S.E., M.Ak  
NIDN : 0414068104

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Michael Yehezkiel  
NIM : 20200100001  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan,  
Dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi (studi pada karyawan Pt Selaras Cipta Bersatu)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** dalam Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

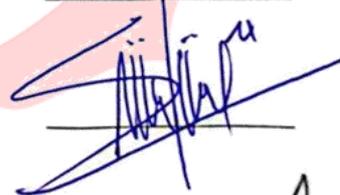
Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.  
NIDN : 0407025901



Penguji I : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401118204



Penguji II : Suhendar Janamarta, S.E., M.M.  
NIDN : 0405068001



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
NIDN : 0427047303



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dilakukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan orignal. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang laia, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma

Tangerang, 07 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Michael Yehezkiel

NIM : 20200100001

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20200100001  
Nama : Michael Yehezkiel  
Jenjang Studi : Strata I  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Karyawan Di Pt Selaras Cipta Bersatu)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkannya atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 07 Februari 2024



(Michael Yehezkiel)

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA  
KARYAWAN DI PT SELARAS CIPTA BERSATU)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari PT Selaras Cipta Bersatu di Tangerang melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan/I di PT Selaras Cipta Bersatu. Sample ditentukan sebanyak 100 responden. Metode dalam penelitian ini adalah causal study, yaitu sebuah studi dimana peneliti ingin menggambarkan penyebab dari satu atau lebih masalah serta akibat yang ditimbulkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, pengumpulan sample menggunakan metode Purposive Sampling dan kemudian data diolah menggunakan program SPSS versi 25.00 yang selanjutnya digunakan untuk menguji hubungan variabel yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak diperoleh nilai  $0.033 < 0.050$  berarti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu, (2) Sosialisasi perpajakan diperoleh nilai  $0.010 < 0.050$  berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu (3) Tingkat Pendidikan diperoleh nilai  $0,003 < 0.050$  berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu, (4) Kesadaran wajib, Sosialisasi perpajakan dan Tingkat Pendidikan secara simultan diperoleh nilai  $0,000 < 0.05$  berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,  
Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS,  
TAXATION SOCIALIZATION, AND EDUCATIONAL LEVEL ON  
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE  
(STUDY ON EMPLOYEES AT PT SELARAS CIPTA BERSATU)**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine (1) The influence of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. (2) The Influence of Taxpayer Socialization on Individual Taxpayer Compliance. (3) the influence of education level on individual taxpayer compliance. The independent variables in this research are taxpayer awareness, tax socialization, education level. Meanwhile, the dependent variable in this research is individual taxpayer compliance. The data source in this research is primary data obtained from PT Selaras Cipta Bersatu in Tangerang through distributing questionnaires to employees at PT Selaras Cipta Bersatu. The sample was determined as 100 respondents. The method in this research is a causal study, namely a study where the researcher wants to describe the causes of one or more problems and the consequences they cause. The data analysis technique in this research uses multiple linear regression, sample collection uses the Purposive Sampling method and then the data is processed using the SPSS version 25.00 program which is then used to test the relationship between existing variables. The research results show that (1) Taxpayer awareness obtained a value of  $0.033 < 0.050$ , meaning it has a significant effect on Taxpayer compliance in the annual SPT of individual taxpayers at PT Selaras Cipta Bersatu, (2) Tax socialization obtained a value of  $0.010 < 0.050$ , meaning it has a significant effect on Taxpayer compliance in the annual SPT of individual taxpayers at PT Selaras Cipta Bersatu (3) Level of Education obtained with a value of  $0.003 < 0.050$  means it has a significant effect on Taxpayer compliance in the annual SPT of individual taxpayers at PT Selaras Cipta Bersatu, (4) Mandatory awareness , Tax socialization and education level simultaneously obtained a value of  $0.000 < 0.05$ , meaning it has a significant effect on taxpayer compliance in the annual SPT of individual taxpayers at PT Selaras Cipta Bersatu.*

**Keyword :** *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Education Level*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul: **“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Serta Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Karyawan Di PT Selaras Cipta Bersatu)”**

Tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan studi dan dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program S1 Konsentrasi Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan pada Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
2. Kepada kedua Orang Tua penulis (Theos Djohan & Syanti Dewi) yang selalu memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi baik secara material dan materi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
3. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

6. Bapak Benyamin Melatnebar, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, petunjuk pengarahannya serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
7. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan
8. Seluruh Pegawai, Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah membantu kelancaran administrasi registrasi selama ini dan telah membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Vera Herawati direktur utama, Bapak Sucahyadi selaku wakil direktur, Julius Jacobus selaku komisaris di PT Selaras Cipta Bersatu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada kekasih penulis Yohana bella ameillia yang telah sangat berjasa dalam meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan penulis motivasi, dukungan serta kritik
11. Kepada seluruh staf PT Selaras Cipta Bersatu dan semua pihak yang telah memberikan saran, kritik, semangat, dorongan serta doa dalam menyelesaikan penelitian ini
12. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa, semangat dan selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi mempunyai jasa yang tidak ternilai selama penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan yang terdapat karena keterbatasan waktu dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya mendukung dan membangun sehingga menjadi lebih baik di kemudian hari.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-  
penelitian selanjutnya.

Tangerang, 06 Februari 2024



Michael Yehzekiel

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKIRPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	8
1. Teori Atribusi (Attribution Theory) .....	8
2. Perpajakan.....	9
a. Pengertian Pajak .....	9
b. Fungsi Pajak .....	10
c. Ciri - ciri Pajak .....	11
d. Asas pemungutan pajak di Indonesia.....	12
e. Unsur Perpajakan .....	14
f. Sistem Pemungutan Pajak .....	17

g.	Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.....	18
h.	Pajak Penghasilan 21 .....	20
i.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	20
3.	Kesadaran Wajib Pajak .....	21
a.	Pengertian kesadaran Wajib Pajak .....	21
b.	Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	22
c.	Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	23
4.	Sosialisasi Pajak .....	24
a.	Pengertian Sosialisasi Pajak .....	24
b.	Metode Sosialisasi.....	25
c.	Strategi Sosialisasi .....	26
d.	Indikator Sosialisasi Perpajakan .....	29
5.	Tingkat Pendidikan .....	29
a.	Pengertian Pendidikan .....	29
b.	Indikator Tingkat Pendidikan .....	31
c.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan.....	31
B.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
C.	Kerangka Pemikiran .....	39
D.	Perumusan Hipotesa .....	40
1.	Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	40
2.	Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	40
3.	Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	41
4.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A.	Jenis Penelitian .....	43
B.	Objek Penelitian .....	43
C.	Jenis Dan Sumber Data .....	45
1.	Jenis data.....	45
2.	Sumber Data .....	45
D.	Populasi Dan Sampel .....	46
1.	Populasi.....	46
2.	Sample.....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48

1. Kusioner atau Angket.....	48
2. Wawancara .....	49
3. Observasi .....	50
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	50
1. Variabel Independen .....	50
2. Variabel Dpenden.....	50
G. Teknik Analisis Data .....	52
1. Uji Statistik Deskriptif .....	53
2. Uji Kualitas Data .....	54
a. Uji Validitas.....	54
b. Uji Reabilitas.....	55
3. Uji Asumsi Klasik .....	56
a. Uji Normalitas .....	56
b. Uji Multikolonieritas.....	56
c. Uji Heteroskedastisitas .....	57
4. Uji Koefisien Determinasi .....	58
5. Uji Regresi Linier Berganda.....	58
6. Uji Hipotesis.....	59
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T).....	59
b. Uji signifikan Simultan (Uji F) .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran umum kantor PT Selaras Cipta Bersatu.....	61
B. Distribusi dan Hasil Jawaban Responden .....	63
C. Analisis Hasil Penelitian .....	66
1. Statistik Deskriptif .....	66
2. Uji Kualitas Data .....	72
a. Uji Validitas.....	72
b. Uji Reliabilitas.....	77
3. Uji Asumsi Klasik .....	79
a. Uji Normalitas .....	79
b. Uji Multikolinieritas.....	81
c. Uji Heteroskedastisitas .....	83
4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	83
5. Uji Regresi Linier Berganda.....	84

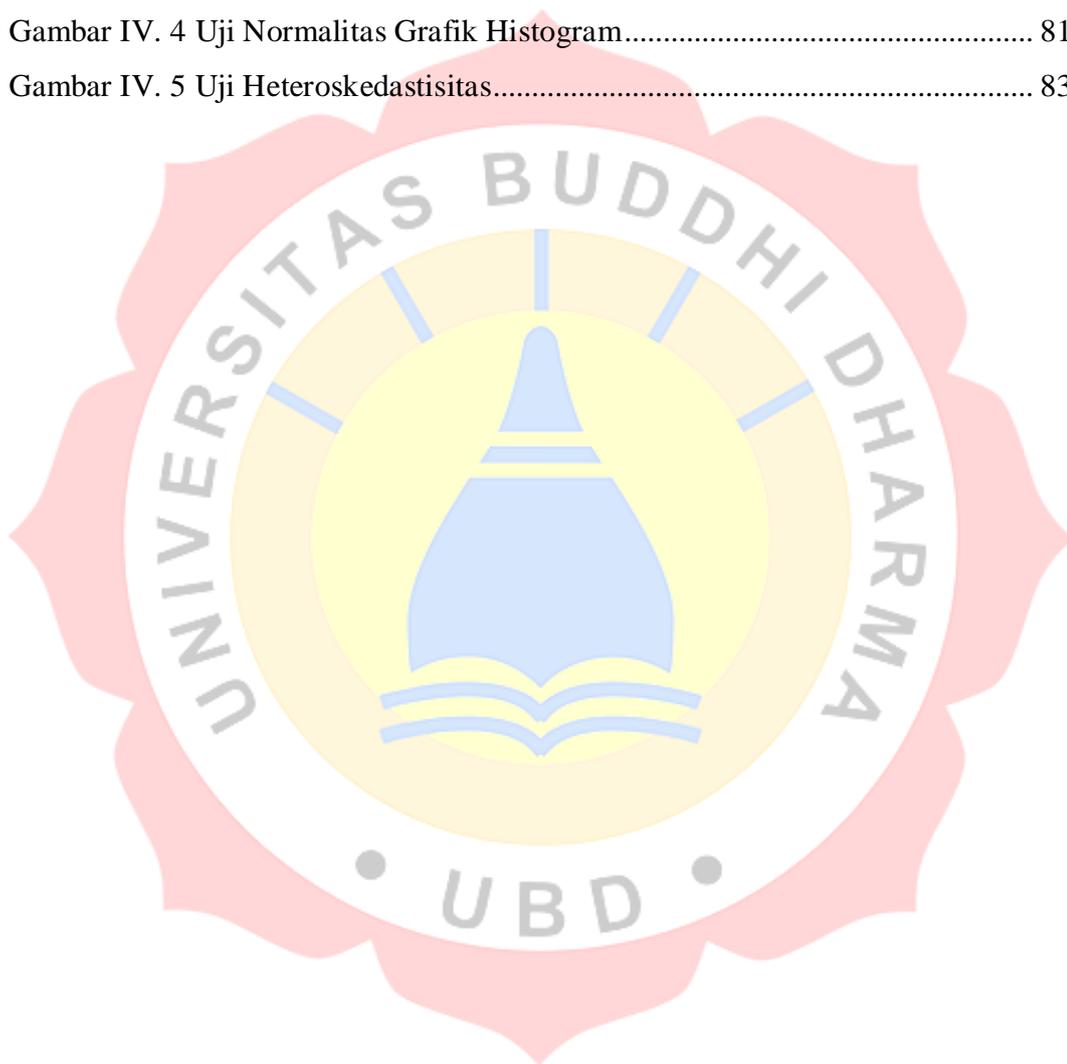
6. Uji Hipotesis .....	86
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) .....	86
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	88
D. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis .....	89
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	89
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	90
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	91
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>
<b>SURAT KETERANGAN RISET .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	20
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel III. 1 Skala Likert.....	49
Tabel III. 2 Ringkasan Indikator Variabel .....	51
Tabel III. 3 Panduan untuk Mengkategorikan Skor Tanggapan Responden .....	53
Tabel IV. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Tabel IV. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	64
Tabel IV. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status sPerkawinan .....	65
Tabel IV. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	65
Tabel IV. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak..	66
Tabel IV. 6 Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1) .....	66
Tabel IV. 7 Uji Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X2) .....	67
Tabel IV. 8 Uji Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan (X3) .....	68
Tabel IV. 9 Uji Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	69
Tabel IV. 10 Uji Deskriptif Variabel Penelitian (X1,X2,X3 dan Y) .....	70
Tabel IV. 11 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	72
Tabel IV. 12 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2) .....	73
Tabel IV. 13 Uji Validitas Tingkat Pendidikan (X3).....	74
Tabel IV. 14 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	75
Tabel IV. 15 Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	77
Tabel IV. 16 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X2).....	77
Tabel IV. 17 Uji Reliabilitas Tingkat Pendidikan (X3).....	78
Tabel IV. 18 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	78
Tabel IV. 19 Uji Normalitas. ....	79
Tabel IV. 20 Hasil Uji multikolinieritas .....	81
Tabel IV. 21 Uji Koefisien Determinasi .....	84
Tabel IV. 22 Uji Regresi Linier Berganda.....	84
Tabel IV. 23 Uji F .....	88

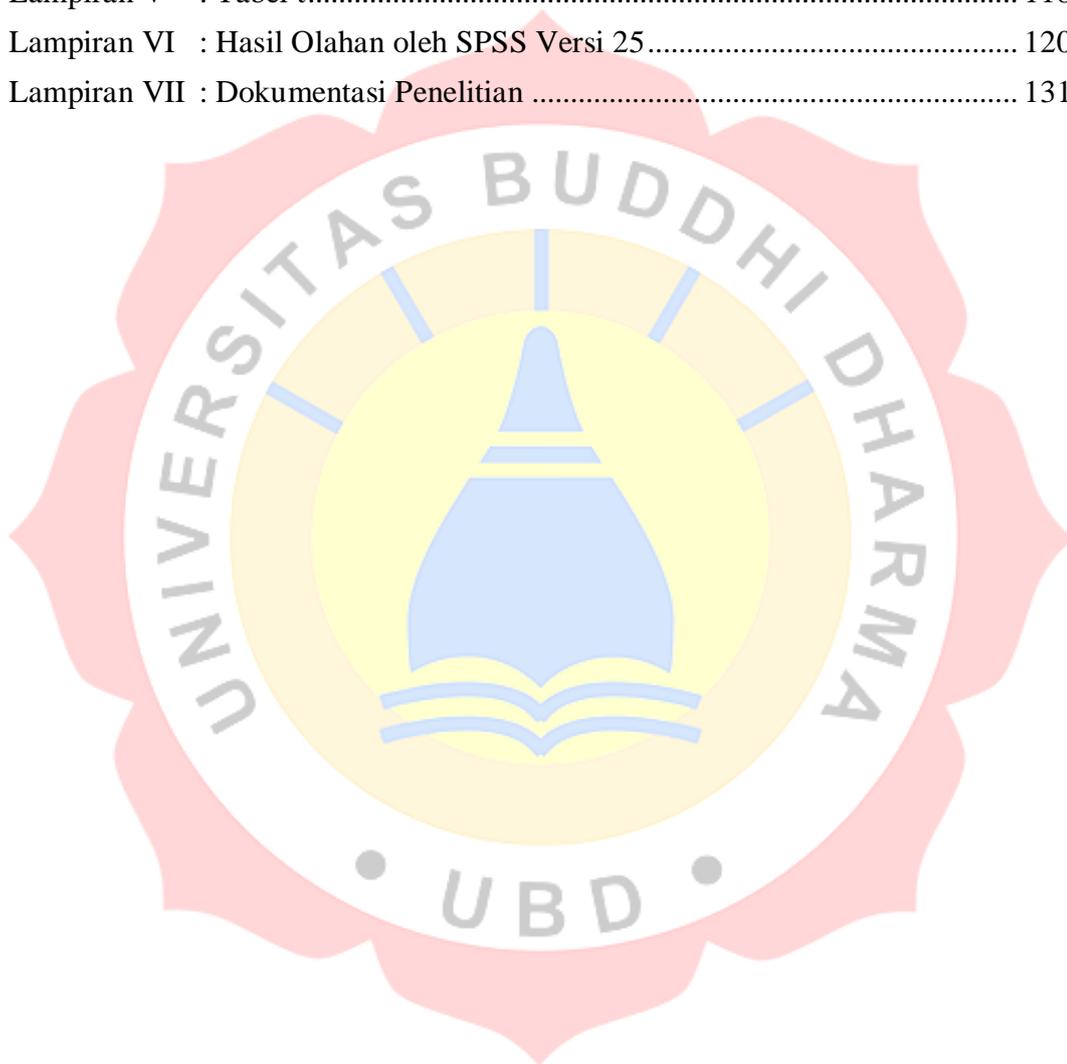
## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar IV. 1 Logo PT. Selaras Cipta Bersatu .....	61
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT PT Selaras Cipta Bersatu .....	62
Gambar IV. 3 Uji Normalitas Normal Probability Plot ( <i>P-Plot</i> ) .....	80
Gambar IV. 4 Uji Normalitas Grafik Histogram.....	81
Gambar IV. 5 Uji Heteroskedastisitas.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran II	: Data Hasil Responden .....	108
Lampiran III	: Tabel R .....	116
Lampiran IV	: Tabel F.....	117
Lampiran V	: Tabel t.....	118
Lampiran VI	: Hasil Olahan oleh SPSS Versi 25.....	120
Lampiran VII	: Dokumentasi Penelitian .....	131



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban membayar kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan, yang harus dipenuhi tanpa penerimaan imbalan langsung sebagai hasil dari pembayaran pajak tersebut. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan guna mendukung pengeluaran dan program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan berbagai kegiatan publik lainnya. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis transaksi dan sumber pendapatan, seperti penghasilan pribadi, laba perusahaan, penjualan barang dan jasa, properti, warisan, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengatur pajak tergantung pada struktur pemerintahan suatu negara.

Pendapatan domestik Indonesia terutama berasal dari pajak, dengan sebagian besar pendapatan ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara menerima sekitar 73,7% dari total pendapatannya dari pajak (kemenkeu, 2022).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang secara sengaja dan terencana menciptakan lingkungan pembelajaran. Lingkungan ini

memungkinkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi mereka, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan yang mereka miliki. Selain itu, pendidikan bertujuan untuk membekali mereka dengan kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, dan keterampilan yang tinggi. Gagasan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak akan dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang perpajakan terkait dengan pencapaian pendidikan suatu bangsa. Seorang wajib pajak lebih mungkin untuk terus mengikuti hukum dan membayar pajak mereka jika mereka memiliki pendidikan yang lebih baik..

Penggunaan pendapatan suatu negara mencerminkan arah pembangunan yang diinginkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, pendapatan terbesar berasal dari pajak dan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah. Indonesia memungut pajak dengan berbagai tarif sesuai dengan tingkat pendapatan warganya (Suak, 2019). Salah satu sumber utama pendanaan bagi bangsa, pajak sangat penting untuk banyak aspek kehidupan negara, termasuk pembangunan, karena mereka menyediakan uang untuk semua jenis pengeluaran, termasuk pembangunan (Mardiasmo, 2018). Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus mengerahkan segala upaya'nya untuk meningkatkan pendapatan pajak karena pentingnya fungsi pajak ini.

Agar lebih memahami dan berkontribusi dalam keuangan, sosialisasi keuangan merupakan kegiatan yang mencoba memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada masyarakat umum, dunia usaha, pegawai negeri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. pelaksanaan kewajiban

mereka sesuai dengan Surat Edaran Resmi Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan sebagian besar dengan sosialisasi pajak, yang memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang undang-undang perpajakan dan membantu mereka lebih memahami kewajiban rutin mereka untuk mengajukan pajak dan membayarnya (Lianty et al., 2017).

Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan/pemilik perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa tersebut, atau aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau non-karyawan. Jika suatu perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab pemotongan pajaknya, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi pajak, dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang oleh karyawannya, bukan memungut atau menerimanya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak 11,39 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 31 Maret 2023. Wawasan ini mencakup wajib pajak orang pribadi dan badan. Secara persentase, jumlah laporan tersebut setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunannya. Para pengamat menilai pemahaman tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal. Diperkirakan jika penghasilan sudah dipotong pajak, maka tidak perlu menyampaikan SPT. Hal ini biasa terjadi di kalangan karyawan. Selain itu, pelaporan menggunakan e-filing sulit dilakukan sehingga pelaporan menjadi membosankan. SPT juga dinilai rumit sehingga banyak yang ragu untuk menyelesaikannya. Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), keterlambatan penyampaian SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 bagi wajib pajak badan. Biaya keterlambatannya kecil, sehingga membuat orang enggan melaporkan, dan ada pula yang sengaja melakukannya.

## **B. Identifikasi masalah**

Dengan mempertimbangkan informasi yang sudah dijelaskan tentang latar belakang masalah, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran akan faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan dipotong pajak sehingga tidak diperlukan SPT, khususnya di kalangan pekerja, berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak..
2. Wajib Pajak mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya, baik secara sengaja maupun karena kurangnya kesadaran akan konsekuensinya.

3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan harus ditinjau ulang, baik dalam hal penyederhanaan prosedur maupun peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat..
4. Pegawai dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kesulitan memahami dan menerapkan prosedur pelaporan pajak..

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar mengetahui kesadaran serta pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi PT Selaras Bersatu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
3. Untuk memperoleh pemahaman mengenai dampak sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu.

4. Agar mengetahui kesadaran, Sosialisasi, serta Tingkat pendidikan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Selaras Cipta Bersatu

#### **E. Manfaat penelitian**

Bagi peneliti, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pengalaman dan peningkatan pemahaman tentang bagaimana kesadaran wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Dalam konteks pengetahuan ilmiah, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi penting untuk penelitian masa depan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan pada pemahaman dan pengalaman, baik dalam kerangka teori maupun praktik, yang berkaitan dengan pelaporan perpajakan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab yang disusun secara konsisten dan metodis yang masing-masing memiliki penjelasan yang menyeluruh sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang topik penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan teknik penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup tinjauan teori tentang variabel independen dan dependen, serta kerangka kerja, temuan dari studi sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

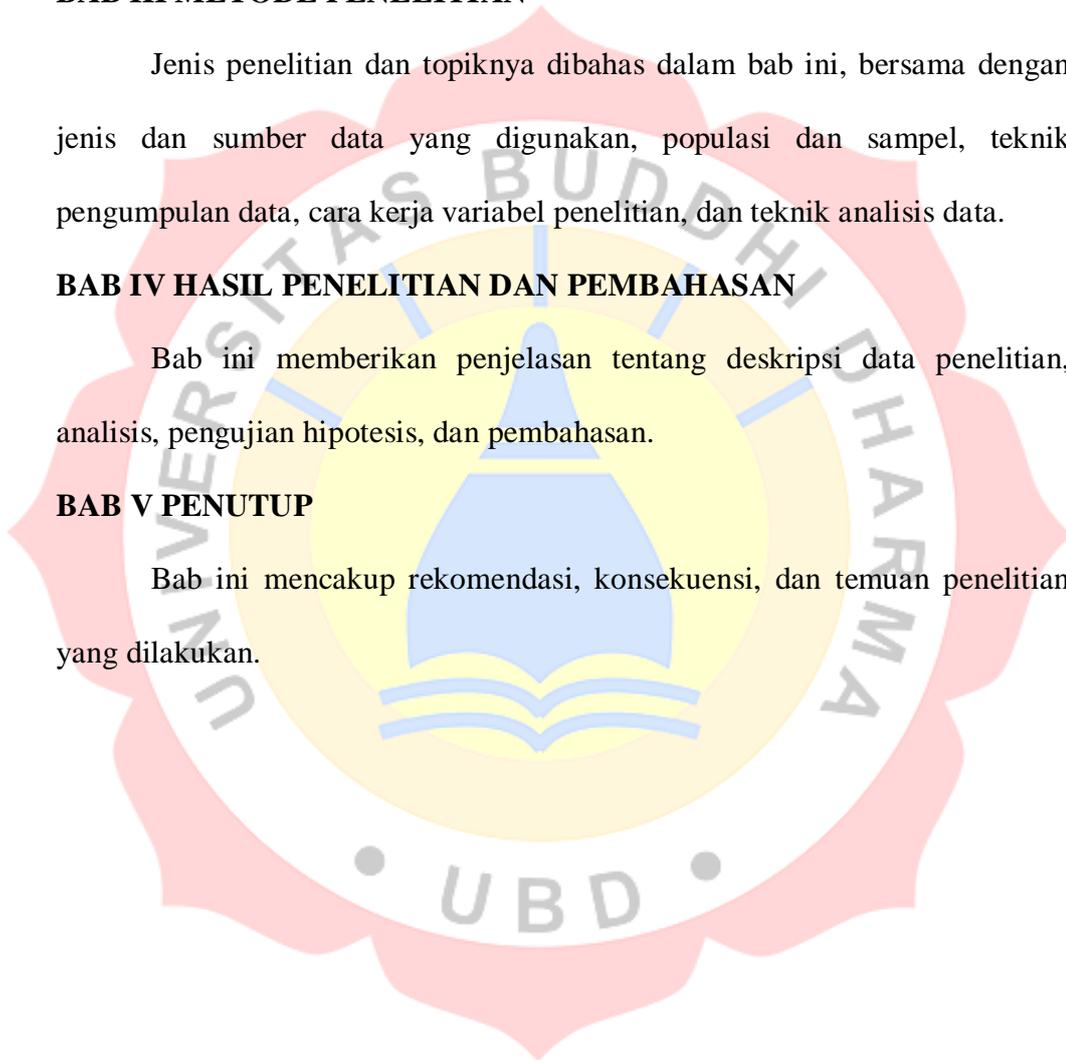
Jenis penelitian dan topiknya dibahas dalam bab ini, bersama dengan jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, cara kerja variabel penelitian, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang deskripsi data penelitian, analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup rekomendasi, konsekuensi, dan temuan penelitian yang dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Heider (1958) adalah orang pertama yang menyelidiki atribusi. Menurut Heider, setiap orang pada dasarnya adalah pseudo-ilmuwan yang mencoba memahami perilaku orang lain dengan memperoleh dan mengumpulkan potongan-potongan pengetahuan sampai mereka sampai pada penjelasan yang masuk akal untuk alasan perilaku spesifik orang lain. Teori atribusi adalah proses menyimpulkan tujuan, niat, dan sifat orang lain dari tindakan yang mereka amati. Atribusi adalah proses menentukan apa yang menyebabkan individu lain berperilaku dengan cara tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan untuk memberikan atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Teori atribusi adalah sikap tidak sadar ketika melakukan sesuatu yang menyebabkan orang melalui serangkaian tes untuk menemukan apakah kata-kata dan tindakan orang lain dapat mewakili karakteristik yang mendasari di dalamnya, atau hanya reaksi paksa terhadap kondisi tertentu.

Menurut teori atribusi, ketika orang menyaksikan perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu dihasilkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang dihasilkan secara internal

didefinisikan sebagai perilaku yang diasumsikan berada di bawah kendali sadar individu, seperti ciri-ciri kepribadian, kesadaran, dan bakat. Perilaku yang disebabkan secara eksternal didefinisikan sebagai perilaku yang dipengaruhi dari luar, menyiratkan bahwa individu didorong untuk berperilaku sebagai akibat dari kondisi seperti pengaruh sosial dari orang lain.

## **2. Perpajakan**

### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo, p. (2016, p. 3) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang termasuk dalam kas negara yang melaksanakan Hukum dan implementasinya dapat dipaksa tanpa jawaban dinas. Iuran digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran demi kepentingan umum (Mardiasmo, 2016, p. 3) Komponen ini menjelaskan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik masyarakat harus membayar pajak secara sukarela dan teliti. Penerimaan pajak merupakan sumber akseptabilitas yang tersedia secara konsisten dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Menurut Soemitro (2013) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) Pajak adalah iuran yang terutang ke Kas Negara oleh perorangan sesuai dengan undang-undang (yang dapat dilaksanakan)

dan tanpa pengadaan jasa (counterperformance) yang dapat diverifikasi dan dimanfaatkan untuk menutupi pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2014), dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah kontribusi kepada Negara (yang dapat dilaksanakan) terutang oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan, tanpa memperoleh kinerja ulang yang dapat segera ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas-tugas Negara yang mengelola pemerintah.

Menurut penulis, perpajakan adalah kontribusi yang diamanatkan masyarakat ke kas negara yang digunakan untuk keperluan negara dan dipaksa oleh imbalan yang tidak segera dirasakan oleh masyarakat, sesuai pemahaman beberapa para ahli.

#### **b. Fungsi Pajak**

Agung, p. (2014, p. 34) mengidentifikasi dua peran perpajakan, yaitu sebagai berikut:

##### **1) Fungsi Budgetair**

Salah satu sumber uang yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah adalah penerimaan pajak. Sebagai ilustrasi, pajak yang termasuk dalam anggaran penerimaan negara.

## 2) Fungsi Reguler

Pajak adalah alat yang digunakan dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan. Sebagai ilustrasi, terkena pungutan pajak terkait alcohol atau minuman keras

Mardiasmo, p. (2016, p. 4) mengidentifikasi dua peran perpajakan, yaitu sebagai berikut:

### 1) Fungsi Budgetair

Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu asal pendapatan bagi pemerintah guna menutupi pengeluaran-pengeluarannya.

### 2) Fungsi Reguler

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberlakukan dan menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi. Sebagai ilustrasi, Pengerakan pajak yang tinggi pada produk-produk mewah bertujuan untuk mengendalikan perilaku konsumtif.

## c. Ciri - ciri Pajak

Berdasarkan penjelasan perpajakan yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak terdiri dari :

- 1) Kontribusi wajib dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara
- 2) Pemungutan pajak dapat dilakukan secara wajib atau dengan kekuasaan hukum.
- 3) Tidak menerima kompensasi secara langsung.
- 4) Diatur oleh hukum

- 5) Digunakan untuk membayar keperluan pemerintah yang berkaitan dengan kemakmuran masyarakat.

#### **d. Asas pemungutan pajak di Indonesia**

Negara yang beragam mungkin memiliki kebijakan pengumpulan pajak yang beragam, dan Indonesia tidak terkecuali. Undang-undang yang membahas dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak memberikan peraturan untuk pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan premis ini, pemerintah juga merumuskan peraturan yang mengatur kegiatan perpajakan Indonesia, khususnya asas pemungutan pajak. Indonesia menerapkan 7 asas pemungutan pajak yang berfungsi sebagai kriteria untuk semua penarikan pajak, yaitu :

##### 1) Asas Finansial

Menurut pendekatan ini, pengumpulan pajak dilakukan sesuai dengan pendapatan atau situasi keuangan wajib pajak.

##### 2) Asas Ekonomis

Menurut asas ini, uang yang dikumpulkan oleh negara melalui pemungutan pajak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu, uang yang dikumpulkan dari setiap wajib pajak tidak boleh berkontribusi pada penurunan atau kejatuhan ekonomi.

### 3) Asas Yuridis

Pengumpulan pajak di Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Asas-asas hukum ini memastikan bahwa proses pengumpulan pajak di Indonesia berlangsung dengan keadilan dan kewajaran, sehingga tidak dilakukan secara semena-mena. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kerangka hukum yang mengatur proses tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.

### 4) Asas Umum

Setiap objek pajak dan wajib pajak pada umumnya akan dikenakan pemungutan pajak di Indonesia. Setiap wajib pajak akan memiliki jumlah pajak sesuai dengan porsinya setelah perhitungan yang cermat. Pemungutan yang dilakukan di Indonesia akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

### 5) Asas kebangsaan

Asas yang diterapkan ditentukan oleh status kewarganegaraan wajib pajak. Ini berarti bahwa setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia diharuskan membayar pajak sesuai dengan hukum Indonesia. Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa warga negara asing dianggap sebagai subjek pajak domestik jika mereka tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender.

#### 6) Asas Sumber

Asas yang diterapkan didasarkan pada sumber pendapatan negara. Asas sumber adalah kebalikan dari Asas domisili karena mengabaikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

#### 7) Asas Wilayah

Asas didasarkan pada domisili wajib pajak, terlepas dari apakah orang tersebut adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Contohnya, Ibu Yohana adalah konsultan pajak WNI yang tinggal di Taiwan, baik tempat tinggal maupun barang yang digunakannya tidak harus dikenakan pajak pemerintah Indonesia, sesuai konvensi regional. Di sisi lain, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negeri ini.

#### e. Unsur Perpajakan

Secara umum unsur pajak di Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat kategori. subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Berikut penjelasan yang lebih mendalam:

##### 1) Subjek Pajak

Subjek pajak adalah faktor pertama dalam perpajakan. Dalam masalah perpajakan, ada individu dan entitas yang tinggal di satu

negara yang mengenakan pajak pada penduduknya. Merupakan unsur pertama disebut demikian karena tidak ada pajak yang harus dibayar oleh penduduk jika tidak ada subjek pajak. Karena yang akan membayar saja tidak ada, mereka yang dikenakan pajak oleh pajak adalah orang atau institusi daripada komoditas atau jasa. Akibatnya, subjek pajak harus ada dalam sistem pajak suatu negara.

## 2) Wajib Pajak

Wajib pajak adalah unsur kedua dari perpajakan. Wajib pajak ini juga mencakup individu dan organisasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat membayar pajak. Akibatnya, pajak menjadi beban baginya dan harus dibayar. Jika mereka tidak membayar pajak mereka akan menghadapi denda dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayar pajak hanyalah orang dan institusi. Sementara itu, barang dan jasa merupakan unsur pajak yang lain. Akibatnya, barang dan jasa tidak dikenakan pajak. Karena mereka yang dibebani dengan membayar pajak adalah orang dan badan yang berfungsi sebagai wadah untuk barang dan jasa ini. Akibatnya, jangan sampai salah membedakan mana wajib pajak dan bukan wajib pajak. Biasanya, individu yang dikenakan pajak disesuaikan dengan usianya. Jika Anda masih di bawah umur, kedua orang tua mempertahankan kepemilikan wajib pajak. Ketika datang ke badan atau lembaga, wajib pajak disematkan

ketika bisnis dibuat. Hanya nominal pajaknya yang berbeda. Karena didasarkan pada kuantitas bisnis dan pendapatan yang dihasilkan setiap bulan atau tahun.

### 3) Objek Pajak

Jika wajib pajak adalah orang pribadi, atau badan yang harus membayar pajak, maka objek pajak adalah produk, barang, atau jasa yang harus dikenakan pajak. Jika Anda memiliki properti berupa bangunan beserta tanahnya, Anda harus membayar pajak kepada pemerintah. Pajak ini dikenal dengan sebutan Pajak Bangunan (PBB), dan bangunan tersebut adalah yang menjadi fokus dari pemungutan pajak ini, yang disebut Sebagai objek pajak. Anda mengoperasikan layanan catering penghasilan perhari melebihi Rp10.000.000. Maka presentase dari pendapatan harus dikurangkan untuk membayar pajak. Ini disebut pajak penghasilan, layanan atau bisnis anda disebut sebagai objek pajak.

### 4) Tarif Pajak

Tarif pajak adalah unsur perpajakan terakhir. Tarif pajak adalah pajak nominal yang harus dibayar wajib pajak atas barang dan jasa yang dikenai pajak. Di Indonesia, rumus persentase digunakan untuk menghitung tarif pajak. Artinya, wajib pajak membayar pajak sebesar persentase dari biaya barang dan jasa yang mereka miliki.

Kesimpulan Sekarang setelah Anda mempelajari beberapa arti dan komponen pajak, saatnya membayar pajak tepat waktu. Jika Anda memiliki bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan ini untuk menghitung pajak bisnis Anda. Jika Anda mengalami masalah dalam menghitung pajak bisnis, Anda dapat mencari bantuan dari profesional pajak yang memiliki reputasi baik.

#### f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Mekanisme pengumpulan pajak berbeda dari satu negara ke negara berikutnya. Di Indonesia terdapat tiga mekanisme pemungutan pajak digunakan, Menurut Mardiasmo, p. (2018, p. 9) yaitu

##### 1) *Official Assesment System*

Adalah teknik pengumpulan yang memungkinkan pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri –ciri Official Assesment System :

- (a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
- (b) Wajib Pajak cenderung tidak aktif.
- (c) Utang pajak dibuat ketika fiskus mengeluarkan surat penilaian pajak.

## 2) *Self Assessment System*

Adalah Sistem pengumpulan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri.

Ciri –ciri Self Assesment System :

- (a) Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
- (b) Wajib pajak aktif mulai dengan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak mereka.
- (c) Fiskus tidak terlibat secara aktif dan hanya melakukan pengawasan.

## 3) *Withholding System*

Mekanisme pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (baik non-fiskus maupun wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-Ciri : Kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang kepada pihak ketiga, khususnya fiskus dan wajib pajak.

### **g. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo, p. (2018, p. 10) Hambatan pemungutan pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1) Perlawanan Pasif

Orang ragu-ragu (pasif) untuk membayar pajak, yang dapat disebabkan dengan :

- (a) Perkembangan intelektual dan etika sosial masyarakat.
- (b) Sistem pajak yang mungkin rumit bagi masyarakat untuk memahami.
- (c) Pelaksanaan sistem pengendalian yang tidak berjalan dengan baik atau tidak dapat dilakukan dengan efektif.

### 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup semua upaya dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Antara lain :

- (a) tax avoidance, Kegiatan penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kekurangan ketentuan perpajakan. Misalnya, laba bersih yang dilaporkan kurang dari itu.
- (b) tax evasion, Tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak, termasuk tindakan seperti menyembunyikan pendapatan, memanipulasi laporan keuangan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan pajak yang berlaku (menggelapkan pajak)

#### **h. Pajak Penghasilan 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Penerimaan yang dimaksud berupa upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas nama apa pun yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Wajib pajak orang pribadi membayar pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatannya. Yang Dikenakan Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, atas nama dan dalam bentuk apa, bahkan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi Subyek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pohan, 2013).

#### **i. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

**Tabel II. 1**  
**Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 – 60 juta	5%
Rp60 – 250 juta	15%
Rp250 juta – 500 juta	25%
Rp500 juta – 5 miliar	30%

Lebih dari Rp5 miliar	35%
-----------------------	-----

Sumber : Undang Undang Nomor 58 Tahun 2023

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak 21% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP

### **3. Kesadaran Wajib Pajak**

#### **a. Pengertian kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib pajak merupakan Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara otomatis, seperti mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2011, p. 128).

Kesadaran wajib pajak membayar pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan secara sukarela menerapkan ketentuan perpajakan; Hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kehendaknya dan secara otomatis melaksanakan kewajiban perpajakannya Menurut Jatmiko (2006)

Menurut Nasution (2006: 7) Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang mengerti dan bersemangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta telah melaporkan seluruh

penghasilannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

kesadaan dimiliki wajib pajak apabila sesuai dengan penjelasan berikut (Muliari & Setiawan, 2011)

- 1) Menyadari adanya aturan dan ketentuan perpajakan
- 2) Mengetahui peran pajak dalam pembiayaan dalam negara.
- 3) Mengakui bahwa tanggung jawab pajak harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 4) Memahami peran pajak dalam pembiayaan daam negara.
- 5) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan.
- 6) Menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan akurat.

Wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi menurut Zaikin et al. (2022) dapat dilihat dari :

- 1) Mengetahui tentang aturan dan ketentuan perpajakan (Pengetahuan wajib pajak)
- 2) Mengerti bahwa tugas perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pemahaman wajib pajak)
- 3) Kesiediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban mereka.

### c. Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak melibatkan hasil penelitian Jatmiko (2006), yang menunjukkan bahwa sebagian besar faktor internal menjadi penentu utama dalam perilaku kesadaran wajib pajak yang patuh, seperti:

#### 1) Persepsi Wajib Pajak

Jika ada persepsi positif terhadap pajak di masyarakat, wajib pajak akan lebih sadar akan kewajibannya. Menurut Torgler (2008), kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak berkaitan dengan persepsi seperti model fungsi pajak untuk pendanaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, serta keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

#### 2) Tingkat pengetahuan yang dimiliki dalam pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak

Perilaku kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan lebih cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, semakin banyak wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka semakin mereka memahami wajib pajak tentang konsekuensi yang akan diterima jika gagal memenuhi kewajiban pajaknya.

### 3) Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Keadaan keuangan seseorang merupakan aspek ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Keadaan keuangan suatu perusahaan adalah kemampuan keuangannya, sebagaimana diwakili dalam tingkat profitabilitas dan arus kasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran kepatuhan pajak adalah profitabilitas perusahaan (firm profitability). Perusahaan dengan laba tinggi lebih cenderung melaporkan pajak mereka secara akurat dari pada perusahaan dengan laba rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah biasanya menghadapi tantangan keuangan dan terlibat dalam penggelapan pajak.

## 4. Sosialisasi Pajak

### a. Pengertian Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah proses pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada seseorang sehingga dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam masyarakat (Ritcher, 1987). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007, Direktorat Jenderal Pajak mengatur konsistensi kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Televisi, koran, spanduk, flyer (poster dan pamflet), baliho/micro billboard, dan radio adalah contoh media informasi yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pajak. Interaksi langsung dengan masyarakat, seperti seminar, talktalk, dan

sejenisnya, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi perpajakan. Anda harus menggunakan bahasa yang sederhana dan non-teknis mungkin sambil memberikan informasi sehingga dipahami dengan benar. Masyarakat masih kekurangan informasi pajak, sehingga sosialisasi pajak dapat dilakukan. Interaksi langsung dengan masyarakat, seperti seminar, talktalk, dan sejenisnya, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi perpajakan. Anda harus menggunakan bahasa yang sederhana dan non-teknis mungkin sambil memberikan informasi sehingga dipahami dengan benar. Masyarakat masih kekurangan informasi pajak, sehingga sosialisasi pajak dapat dilakukan.

#### **b. Metode Sosialisasi**

Menurut Herryanto & Toly (2013), proses sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan melalui dua metode yang berikut ini:

##### 1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah latihan sosialisasi pajak yang melibatkan interaksi dengan wajib pajak atau calon wajib pajak secara pribadi. Pendidikan pajak usia dini, pajak masuk sekolah atau pajak masuk kampus, klinik pajak, seminar, lokakarya, kompetisi pajak seperti Pajak cerdas, debat, pidato pajak, dan publikasi adalah contoh sosialisasi langsung.

##### 2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi pajak masyarakat yang melibatkan tidak ada atau sedikit interaksi dengan peserta. Media membedakan antara mode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Acara obrolan TV dan acara bincang-bincang radio adalah contoh media elektronik. Sementara itu, tersedia media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku, brosur pajak, rubrik tanya jawab, artikel pajak, dan komik pajak.

### c. Strategi Sosialisasi

Berikut adalah beberapa bentuk strategi dalam sosialisasi perpajakan (Winerungan, 2013) :

#### 1) Publikasi

Merupakan kegiatan publikasi yang berlangsung melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar maupun majalah dan media audio visual seperti radio dan televisi.

#### 2) Kegiatan

Lembaga pajak dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan tertentu yang terkait dengan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan pada waktu-waktu tertentu. Acara olahraga, hari libur nasional, dan sebagainya adalah contohnya.

#### 3) Pemberitaan

Dalam skenario ini, berita memiliki arti khusus yaitu menjadi konten berita dalam arti positif, menjadikannya alat promosi yang

efisien. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita publik, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pajak dengan lebih cepat.

#### 4) Keterlibatan Komunitas

Melibatkan masyarakat pada dasarnya adalah teknik untuk mendekatkan lembaga pajak dengan masyarakat, karena iklim budaya Indonesia masih menuntut adat istiadat timur untuk menjaga kontak dengan tokoh-tokoh lokal sebelum pembentukan lembaga pajak.

#### 5) Identitas

Sehubungan dengan penggabungan lambang otoritas pajak pada berbagai media promosi.

#### 6) Pendekatan Pribadi

Strategi pribadi yang digunakan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan banyak indikasi sosialisasi dimana tindakan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak yang diadaptasi dari pertumbuhan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013, p.

30)

1) Peyuluhan

Direktorat Jenderal Pajak memberikan banyak indikasi sosialisasi dimana tindakan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak yang diadaptasi dari pertumbuhan program pelayanan perpajakan.

2) Berdiskusi

Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi kontak dua arah antara wajib pajak dengan pejabat pajak (fiskus) dengan masyarakat yang diyakini memiliki pengaruh atau diamati oleh masyarakat sekitar dengan berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.

3) Informasi secara langsung dari petugas fiskus kepada Wajib Pajak.

Petugas pajak segera memberi tahu informasi kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

4) Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk atau baliho di lokasi-lokasi strategis di mana masyarakat dapat melihatnya. Berisi pesan singkat berupa kutipan, kalimat, dan pernyataan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana.

5) Website Ditjen pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk Website dapat diakses melalui internet setiap saat, cepat, sederhana, dan dengan informasi yang lengkap dan terkini.

#### **d. Indikator Sosialisasi Perpajakan**

##### **1) Penyelenggaraan Sosialisasi**

Sosialisasi langsung atau sosialisasi tidak langsung dapat digunakan untuk melaksanakan sosialisasi. Tindakan sosialisasi pajak yang melibatkan interaksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak merupakan sosialisasi langsung. Inisiatif sosialisasi pajak tanpa atau sedikit keterlibatan dengan wajib pajak merupakan sosialisasi tidak langsung.

##### **2) Media Sosialisasi**

Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan buku, serta media elektronik seperti televisi atau radio.

##### **3) Manfaat Sosialisasi**

Acara sosialisasi pajak dapat membantu wajib pajak memahami dan mempelajari prosedur administrasi perpajakan.

#### **5. Tingkat Pendidikan**

##### **a. Pengertian Pendidikan**

Menurut Undang-undang pasal 1 ayat (1) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan adalah upaya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajar, agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual,

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan, baik bagi dirinya, masyarakat bangsa serta Negara”

Menurut Umar (2005) Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan diwariskan dari generasi ke generasi di seluruh dunia. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan dilakukan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial masing-masing masyarakat.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara, p. (2003, p. 50) Pendidikan tingkat adalah suatu proses berjangka panjang yang melibatkan langkah-langkah terstruktur dan terorganisir, di mana para profesional manajemen memperoleh pengetahuan konseptual dan teoritis dengan tujuan umum.

Menurut beberapa perspektif yang diungkapkan di atas, tingkat pendidikan karyawan diperlukan karena akan memungkinkannya untuk memiliki pengaruh positif pada dirinya sendiri dan organisasi tempat dia bekerja. Tingkat pendidikan juga memiliki dampak signifikan pada kemampuan karyawan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Ini disebabkan oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, sehingga karyawan menjadi lebih kompeten dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pekerjaan mereka.

## **b. Indikator Tingkat Pendidikan**

Menurut Umar, p. (2005, p. 53) Indikator tingkat pendidikan mencakup:

### 1) Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah fase pendidikan yang ditentukan berdasarkan perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan keterampilan yang dikembangkan.

### 2) Kesesuaian Jurusan

Kesesuaian Jurusan berarti bahwa sebelum mempekerjakan seorang karyawan, perusahaan mengevaluasi tingkat pendidikannya dan kesesuaian departemen pendidikannya sehingga ia dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan pendidikannya.

### 3) Kompetensi

Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, penguasaan tugas, keterampilan, dan nilai-nilai fundamental yang diwujudkan dalam cara berpikir dan melakukan.

## **c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan**

Menurut Hasbullah, p. (2001, p. 63) Faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan meliputi:

- a. Ideologi, Semua orang yang lahir ke dunia memiliki hak yang sama, terutama hak atas pendidikan dan kemajuan pengetahuan dan pendidikan.

b. Sosial Ekonomi, Status sosial ekonomi yang lebih besar memungkinkan seseorang untuk mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

- 1) Sosial Budaya, Banyak orang tua yang masih belum menyadari nilai pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya.
- 2) Perkembangan IPTEK, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan pembaruan informasi dan keterampilan yang konstan agar tetap kompetitif dengan negara-negara industri.
- 3) Psikologi, Pendidikan konseptual adalah metode untuk mengembangkan kepribadian individu untuk membuatnya lebih berguna.

Maka, masyarakat harus bertindak dan membuat keputusan dengan lebih bijaksana, dan pendidikan dapat menjadi investasi penting dan bermanfaat untuk kemajuan secara keseluruhan.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 21**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zaikin et al. (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan	Variabel Independen (X) Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi	Sosialisasi pajak Mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pajak

		Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Pajak  Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	
2	Varian & Jenni (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)	Variabel Independen (X) Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak  Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak dalam bentuk yang terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM.
3	Umah & Riduwan (2022)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran	Variabel Independen (X) Tingkat Pendidikan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak

		Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak  Variabel Dependen (Y) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	positif pada kepatuhan wajib pajak.  Kesadaran dalam membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, demikian hasil penelitian menunjukkan.
4	Indrayani (2022)	pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen (X) kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus  Variabel Dependen (Y) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan, Pelayanan fiskus tidak memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
	Vionita & Kristanto	pengaruh sosialisasi perpajakan,	Variabel Independen (X)	Menurut temuan penelitian ini,

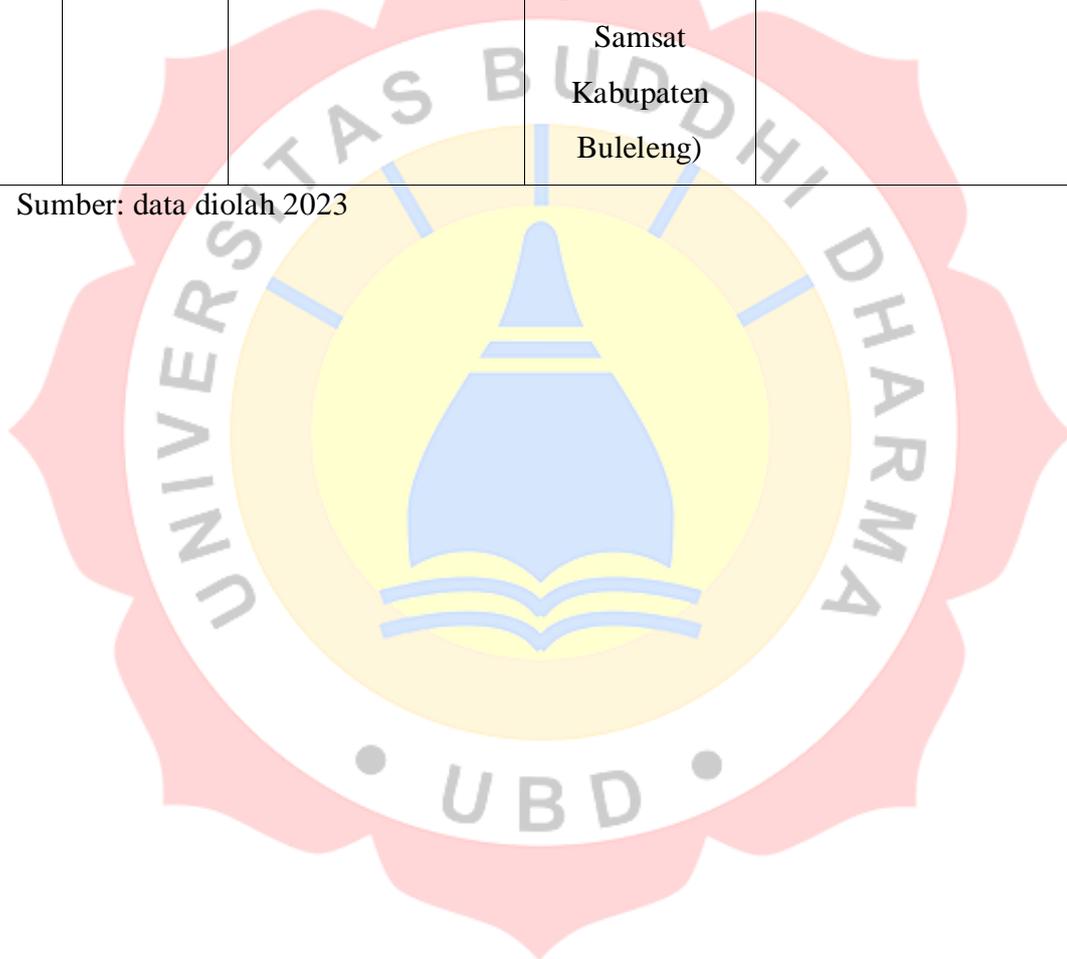
5	(2018a)	kesadaran wajib pajak, dan adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer	sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak  Variabel Dependen (Y) kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer	sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan pajak calon wajib pajak.  Kepatuhan pajak calon wajib pajak tidak terpengaruh oleh kesadaran pajak.
6	(Kristian & Iskandar, 2022)	Pengaruh Sosialisasi , Tingkat Pendidikan , Dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat	Variabel Independen (X) Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Sikap Rasional  Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat	Menurut temuan penelitian ini, dampak sosialisasi pajak dapat dilihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Jakarta Barat.
7	Rizki &	Pengaruh	Variabel	Sosialisasi perpajakan

	Farina (2022a)	Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen (X)  Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Perpajakan  Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang berasal dari UMKM  Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang berasal dari UMKM
8	Gukguk (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan  Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Wilayah Pelayanan Pajak (KPP) Senapelan Kota Pekanbaru.

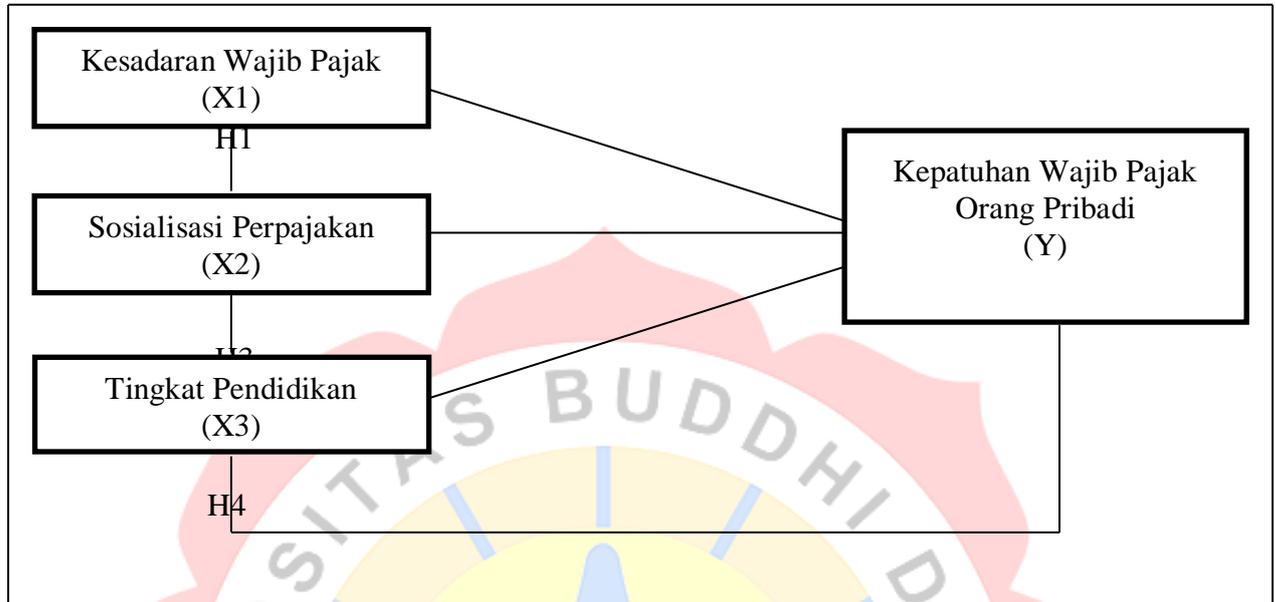
			Orang Pribadi	
9	Gusrefika (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)	Variabel Independen (X) Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)	Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara bersamaan oleh sejumlah faktor, termasuk kesadaran pajak, hukuman pajak, motivasi untuk membayar pajak, dan tingkat pendidikan
10	Yustina et al. (2020)	Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi	Variabel Independen (X) tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan	Tingkat pendidikan secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda dua

		pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng)	Variabel Dependen (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng)	
--	--	--	---	--

Sumber: data diolah 2023



### C. Kerangka Pemikiran



**Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data diolah ditahun 2023

Keterangan:

X1 : Kesadaran Perpajakan

X2 : Sosialisasi Perpajakan

X3 : Tingkat Pendidikan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen).

H1: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan WajibPajak(Y)

H2: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H3: Pengaruh Tingkat Pendidikan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H4: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **D. Perumusan Hipotesa**

Menurut Sugiyono, p. (2018, p. 243) Hipotesis adalah solusi sementara untuk hubungan kausal masalah yang akan terbukti akurat berdasarkan fakta saat ini dengan menguji atau menganalisis data yang telah dikumpulkan. Variabel-variabel yang ada dalam interaksi Sebab akibat diwujudkan dalam pernyataan, yaitu:

##### **1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran adalah sikap wajib pajak yang mengerti dan bersemangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta telah melaporkan seluruh penghasilannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrayani (2022), Gukguk (2021), Gusrefika (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki dampak yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H1 : Kesadaran Wajib Pajak Bepengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2. Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sosialisasi adalah proses pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada seseorang sehingga dapat berfungsi sebagai orang

dewasa dan berperan aktif dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaikin et al. (2022), Varian & Jenni (2023), Vionita & Kristanto (2018a), Kristian & Iskandar (2022) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini mengindikasikan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H2 : Sosialisasi Pajak Bepengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **3. Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan diwariskan dari generasi ke generasi di seluruh dunia. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan dilakukan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial masing-masing masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umah & Riduwan (2022), Gusrefika (2018), Yustina et al. (2020) menyatakan bahwa menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H3 : Tingkat Pendidikan Bepengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan**

Dengan merinci ketiga hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap sejauh mana mereka mematuhi aturan pelaporan dan pembayaran pajak.

Kesadaran perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami dan mengetahui dengan lebih baik mengenai tanggung jawab dan hak-hak mereka dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Sosialisasi Perpajakan memiliki dampak positif yaitu bertujuan menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat, sehingga wajib pajak dapat memahami makna pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak individu.

Tingkat Pendidikan memiliki dampak positif yaitu Pendidikan bertujuan untuk memicu kesadaran dan sikap patuh agar wajib pajak membayar pajak sesegera mungkin. Wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki pemahaman tentang informasi tersebut. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data dengan menggunakan metode ilmiah secara efisien dan sistematis, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengambil keputusan dalam konteks pemecahan masalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, dan dijelaskan menggunakan angka. Secara umum, data seperti ini dimanfaatkan untuk menggambarkan fenomena yang jelas, memiliki alat ukur, dan bersifat statistik.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu penelitian dan kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian berbasis kuantitatif ini adalah untuk menyelidiki apakah kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan berdampak yang signifikan terhadap proses pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi PT Selaras Cipta Bersatu.

#### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian, menurut Satibi (2011), adalah segala sesuatu yang secara luas menggambarkan target penelitian. Subjek penelitian ini adalah

pajak tangguhan dalam rekening keuangan, dengan mengacu pada PSAK no. 46 tentang pajak penghasilan. Perusahaan yang dipilih sebagai subjek penelitian ini adalah PT. Asiaplast Industries, Tbk, produsen plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Objek penelitian, menurut Sugiyono (2018), adalah penelitian, item, atau aktivitas seseorang yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono, p. (2017, p. 41), objek penelitian adalah "sasaran ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan menggunakan sesuatu tentang sesuatu yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)".

Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Analisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Serta Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Karyawan PT Selaras Cipta Bersatu). Variabel yang menjadi faktor bebas atau independen dalam penelitian ini adalah (X) Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Selanjutnya, variabel yang bersifat tergantung atau dependen dalam penelitian ini adalah (Y), yang mencakup Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengumpulan data akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yang dalam hal ini merupakan karyawan di PT Selaras Cipta Bersatu

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Kumpulan data digunakan untuk mempelajari dan memvisualisasikan situasi. Tipe data dapat diklasifikasikan tergantung pada sifat, sumber, metode pengumpulan, dan waktu pengumpulannya. Untuk mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini, penulis menggunakan tipe dan sumber data sebagai berikut:

#### **1. Jenis data**

Jenis data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis adalah data primer, dan data itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua kategori :

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya menggunakan berbagai metode seperti wawancara, survei, tes, dan sebagainya, dan data primer ini unik karena disesuaikan dengan tuntutan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner.
- b. Data sekunder, merupakan bahan atau informasi yang sudah ada sebelumnya yang sengaja diperoleh oleh peneliti, digunakan untuk mengisi kesenjangan data studi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan melalui referensi buku, jurnal, dan sumber lainnya.

#### **2. Sumber Data**

Penulis mendapatkan data kajian dari sumber data primer, yaitu sumber informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan kuisisioner. Dalam penelitian ini, data primer

diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, yang merupakan karyawan PT Selaras Cipta Bersatu dan nantinya akan mengisi kuesioner tersebut.

## **D. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono, p. (2018, p. 80) Populasi merupakan suatu domain umum yang terdiri dari obyek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dan dari situ penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 135 orang karyawan di PT Selaras Cipta Bersatu.

### **2. Sample**

Menurut Sugiyono, p. (2017, p. 81), sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dan populasi terdiri dari berbagai karakteristik.

#### **a. Data Sample**

Sampel responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT Selaras Cipta Bersatu. Metode slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan dalam penyelidikan ini.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tarif Kesalahan sebesar 0.05 (5%)

Sehingga dari rumus di atas maka dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti yakni sebagai berikut :

$$n = \frac{135}{1 + 135 (0.05)^2}$$

$$n = \frac{135}{1 + 0.3375}$$

$$n = \frac{135}{1.3375}$$

$$n = 100.93 \rightarrow 100$$

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa jumlah individu yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah 100 karyawan atau responden.

#### b. Teknik

Ada teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian, menurut Sugiyono, p. (2017, p. 81), teknik pengambilan sampel adalah prosedur pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian, dan ada banyak strategi pengambilan sampel yang digunakan.

Ada dua jenis teknik pengambilan sampel: probability sampling dan non-probability sampling. Para peneliti menggunakan sampling probabilitas dalam penyelidikan mereka. Sugiyono, p. (2017, p. 81) menyatakan bahwa " Probabilitas sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang setara bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel ". Simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, dan sampling area (cluster) sampling adalah semua jenis probability sampling. Para peneliti menggunakan pengambilan simple random sampling dalam penelitian ini. Sugiyono, p. (2017, p. 82) kemudian menyatakan Simple random sampling adalah pemilihan acak anggota sampel dari suatu populasi tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, angket, pengamatan, atau kombinasi dari ketiganya

### **1. Kusioner atau Angket**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis.

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang tepat tentang faktor-faktor yang diteliti.

Karyawan/responden diberikan kuesioner dengan daftar pertanyaan tentang Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pendidikan tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kuesioner dibuat menggunakan skala Likert untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi responden tentang kejadian tersebut.

**Tabel III. 1 Skala Likert**

Kategori	Singkatan	Bobot
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

## 2. Wawancara

Salah satu alat yang digunakan untuk memeriksa data lisan adalah wawancara; Teknik penelitian ini digunakan dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden yang menjadi sampel penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan protokol wawancara yang telah dikembangkan secara metodis dan komprehensif untuk pengumpulan data.

### 3. Observasi

Pengamatan langsung dilakukan untuk menilai objektivitas data yang dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang akan dijadikan sampel penelitian.

## F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Silaen, p. (2018, p. 69) Variabel penelitian adalah pengertian dengan nilai yang bervariasi atau bervariasi, seperti kualitas, karakteristik, atau fenomena yang mungkin menunjukkan sesuatu untuk diamati atau diukur dan yang nilainya bervariasi atau bervariasi.

Variabel-variabel yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup :

### 1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono, p. (2017, p. 39), "variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat)". Variabel bebas (X1), (X2), dan (X3) dalam penelitian ini adalah *Kesadaran Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan*.

### 2. Variabel Dpenden

Menurut Sugiyono, p. (2017, p. 39), "Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen". Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah hasil

belajar siswa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam SPT Tahunan*.

**Tabel III. 2 Ringkasan Indikator Variabel**

NO	Variabel	Indikator Pengukur Variabel	Sumber data	Skala Pengukur
1	Kesadaran Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi pajak melalui bentuk partisipasi memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan negara.</li> <li>2. Menyimpang dari kewajiban membayar pajak sesuai dapat menimbulkan kerugian bagi negara.</li> <li>3. Berpartisipasi dalam program sosialisasi perpajakan yang diadakan secara teratur oleh Direktur Jenderal Pajak.</li> <li>4. Pengenaan pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Wardani & Asis (2017)	Skala Likert
2	Sosialisasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak secara berkala</li> <li>2. Pemahaman ketentuan perpajakan sangat terbantu dengan sosialisasi pajak.</li> <li>3. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan telah efektif dan tepat sasaran.</li> <li>4. Sosialisasi pajak dapat membantu wajib pajak menghargai betapa pentingnya pajak.</li> </ol>	Bungin (2015)	Skala Likert
3	Tingkat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan formal wajib pajak</li> </ol>	Amilin (2009)	Skala Likert
4	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan melibatkan memahami secara</li> </ol>	Jatmiko, p. (2006, p. 17), Jotopurnomo	Skala Likert

		<p>mendalam ketentuan hukum yang mengatur aspek-aspek perpajakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan perhitungan pajak</li> <li>3. Melakukan pengisian formulir perpajakan.</li> </ol>	dan Mangoting (2013)	
--	--	---	----------------------	--

Sumber: Informasi diproses dari berbagai sumber referensi pada tahun 2023

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, p. (2018, p. 42) Teknik analisis data merupakan langkah-langkah sistematis untuk mengeksplorasi dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit tertentu, melakukan sintesis, menyusun pola, pemilihan elemen yang signifikan untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Menurut Moleong, pp. (2017, pp. 280–281) Proses menyusun dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar untuk menemukan tema dan menghasilkan hipotesis kerja berdasarkan data.

Statistical Package for The Social Science (SPSS) digunakan untuk menguji hipotesis ini. Pengujian yang dijalankan dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode pengorganisasian dan evaluasi data kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang terorganisir dari suatu kegiatan. Statistik deskriptif digunakan untuk menguji variabel faktor sampel. Nilai rata-rata (mean), norma deviasi, maksimum, dan minimum dapat ditentukan dengan menggunakan pengolahan data deskriptif secara statistik (Ghozali, 2013).

Tanggapan responden terhadap setiap item pernyataan Dihitung ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

- Nilai tertinggi pada indeks = 5.
- Nilai terendah pada indeks = 1.
- Jarak Interval =  $[\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}] : 5 = (5 - 1) : 5 = 0.8$

Sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut :

**Tabel III. 3**  
**Panduan untuk Mengkategorikan Skor Tanggapan Responden**

Indeks Rata-Rata	Kategori
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber : Penulis (2023)

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya hasil kuesioner. Kuesioner valid jika memiliki pengaruh besar pada klaim kuesioner dan dapat mengungkapkan apa pun yang akan diukur dengan kuesioner serta skor keseluruhan. Berdasarkan pre-test, Uji Validitas dapat menentukan apakah pertanyaan yang diajukan (kuesioner) dapat digunakan untuk mengukur status sebenarnya responden dalam pengambilan sampel. Statistik digunakan dalam pengujian, yang dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak komputer, seperti SPSS. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian untuk menguji validitasnya, yaitu:

#### 1) Validitas faktor

Ketika item disusun menggunakan lebih dari satu faktor (ada kesamaan antara satu faktor dan faktor lainnya), validitas faktor diperiksa. Validitas komponen ini dinilai dengan membandingkan skor faktor (jumlah item dalam satu faktor) dengan skor faktor total (jumlah semua faktor).

#### 2) Validitas item

Korelasi atau dukungan untuk total item (skor total) menunjukkan validitas item; Perhitungan dilakukan dengan menghubungkan skor item dengan total skor item. Jika kita

menggunakan lebih dari satu faktor, kita dapat memverifikasi validitas item dengan membandingkan skor item dengan skor faktor, dan kemudian terus membandingkan skor item dengan skor faktor total (jumlah banyak faktor).

Dari perhitungan korelasi menghasilkan perhitungan koefisien korelasi, yang digunakan untuk memperkirakan jumlah validitas suatu item dan jika layak digunakan. Uji signifikansi koefisien korelasi biasanya dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yang berarti bahwa suatu item dianggap sah jika terhubung secara signifikan dengan skor total.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas ini terhubung dengan masalah kepercayaan instrumen. Konsistensi dan stabilitas skor alat ukur disebut sebagai reliabilitas (Sugiyono, 2017).

Menurut Ghozali (2018) Uji Reliabilitas adalah konstruk atau variabel yang diklaim dapat diandalkan jika memiliki nilai alfa Cronbach 0,6. Ini menandakan bahwa instrumen dapat digunakan sebagai pengumpul data yang dapat dipercaya jika koefisien keandalannya lebih besar dari atau sama dengan 0,6.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Tes ini menentukan apakah data dapat digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik ini menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heterodekedetas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen, atau keduanya, memiliki distribusi normal atau abnormal dalam model regresi. Jika suatu variabel tidak didistribusikan secara teratur, hasil uji statistik akan menurun. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05, data memiliki distribusi normal. Sementara itu, jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05, data tidak memiliki distribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) Multikolinearitas ditentukan dengan memeriksa matriks korelasi variabel independen; Jika ada korelasi yang cukup tinggi (biasanya lebih besar dari 0,90), ini merupakan indikasi multikolinearitas. Multikolinearitas ini memiliki efek meningkatkan jumlah variabel dalam sampel. Ini menunjukkan kesalahan standar yang tinggi, sehingga ketika koefisien diperiksa, t-count dari t-tabel akan rendah. Ini menunjukkan kurangnya hubungan

linier antara variabel independen yang terpengaruh dan variabel dependen.

Nilai Tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Nilai Tolerance mengkuantifikasi variabilitas variabel bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Karena  $VIF = 1/\text{toleransi}$ , nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi, menunjukkan bahwa ada kolinearitas yang kuat. Angka cut-off adalah untuk toleransi 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Tes ini menentukan apakah ada ketidaknyamanan varians dari residu dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Ketika variasi berbeda, ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Salah satu metode untuk menentukan heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda adalah dengan memeriksa grafik scatterplot atau nilai proyeksi variabel terikat, SRESID, dengan kesalahan residual, ZPRED. Jika tidak ada pola yang terlihat dan sumbu y tidak mengembang di atas atau di bawah nol, heteroskedastisitas tidak ada. Model penelitian yang baik adalah yang tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2017) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika koefisien determinasi mendekati nol (0), kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi variabel mendekati satu (1), maka menunjukkan bahwa potensi variabel independen untuk menyebabkan keberadaan variabel dependen meningkat.

Kelemahan yang muncul saat menggunakan koefisien determinasi adalah kecenderungan terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Apabila variabel independen ditambahkan, nilai ( $R^2$ ) akan meningkat, tanpa mempertimbangkan apakah variabel tersebut benar-benar memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

#### 5. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Kuncoro, p. (2013, p. 241) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan derajat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen ketika ada beberapa variabel independen.

Pengaruh dua atau lebih faktor independen pada variabel dependen diselidiki menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki apakah kesadaran pajak,

sosialisasi pajak, dan tingkat pendidikan mempengaruhi pembayaran dan pelaporan pajak dalam SPT tahunan atau tidak. Model persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

Keterangan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi Model

X1 = Kesadaran Perpajakan

X2 = Sosialisasi Perpajakan

X3 = Tingkat Pendidikan

E = Error term model (variable residual)

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Menurut Kuncoro, p. (2013, p. 244), tujuan uji-t dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika signifikansi nilai t adalah 0,05, maka variabel independen memiliki efek parsial pada variabel dependen.

Kriteria berikut menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

- 1) Jika nilai signifikan  $t < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dan variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $t < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dan variabel dependen.

**b. Uji signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua faktor independen terhadap variabel dependen, menurut Ghozali, p. (2013, p. 98). Variabel independen memiliki efek simultan pada variabel dependen jika nilai signifikansinya adalah  $\leq 0,05$ .

